

**PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
PASCA PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM)
LEVEL 4 DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG**

PANJI NAGA BERLIAN
NPP. 29.0571

*Asdaf Provinsi Lampung
Program Studi Studi Kebijakan Publik*

Email:

Panjinagaberlian14@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *(Contains the background behind the research). The implementation of the empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises after the implementation of Level 4 Community Activity Restrictions in Metro City, Lampung Province. The existence of these policies creates obstacles that affect the implementation of micro, small and medium enterprises empowerment programs. **Objective:** to get an overview of how the implementation of empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises after the Implementation of Level 4 Community Activity Restrictions in Metro City, Lampung Province. **Method:** This study uses descriptive qualitative research methods with an inductive approach, where the authors obtain data by means of interviews, observation and documentation **Result:** After the implementation of the restriction on community activities at level 4, it creates obstacles in the implementation of empowerment of micro, small and medium enterprises. The budget given to Micro, Small and Medium Enterprises in the form of Stimulus Assistance is not right on target, there is an error in providing stimulus assistance to business actors who have no business at all. **Conclusion:** The Department of Cooperatives and UMKM as a regional apparatus organization that oversees the nets of micro, small and medium enterprises continues to strive to improve the quality of Micro, Small and Medium Enterprises after being affected by the policy. It is hoped that the Cooperatives and MSMEs Office can communicate directly with MSME business actors, so that they can better know the conditions in the field so that there is no mistargeting in providing assistance to MSME actors, and it is also hoped that not only the program implementers are disciplined and consistent but also the program implementers. business actors also so that all programs can run well, and also program implementers can carry out the existing Standard Operating Procedures.*

Keywords: *Empowerment, MSMEs, Post PPKM*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disaat pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung. Adanya kebijakan tersebut menimbulkan hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan Menengah. **Tujuan:** untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disaat pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung. **Metode:** Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, dimana penulis mendapatkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Anggaran yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa Bantuan Stimulus tidak tepat sasaran, terdapat kekeliruan pemberian bantuan stimulus kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai usaha sama sekali. **Kesimpulan:** Dinas Koperasi dan UMKM sebagai organisasi perangkat daerah yang menaungi jalanya usaha mikro, kecil dan menengah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah terdampak kebijakan tersebut. Diharapkan Dinas Koperasi dan UMKM dapat melakukan komunikasi secara langsung kepada para pelaku usaha UMKM, agar dapat lebih mengetahui kondisi dilapangan agar tidak terjadi salah sasaran dalam pemberian bantuan kepada para pelaku UMKM, dan juga diharapkan tidak hanya para pelaksana Program saja yang disiplin dan konsisten tetapi para pelaku usaha juga agar semua program dapat berjalan dengan baik, dan juga para pelaksana program dapat menjalankan Standar Operasional Prosedur yang sudah ada.

Kata kunci: Pemberdayaan, UMKM, Pasca PPKM



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di awal tahun 2020 ini dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui. Berdasarkan situs resmi Covid-19.go.id Jumlah kasus positif covid- 19 di 224 negara di berbagai belahan dunia pada tanggal 27 Agustus 2021 terdapat lebih dari 213 juta kasus yang ada di berbagai belahan dunia dengan angka kematian mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi kasus Covid-19 pertama di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020. Kasus terkonfirmasi di Indonesia berdasarkan situs resmi Covid- 19.go.id tanggal 27 Agustus 2021, positif sebanyak 4.056.354, sembuh 3.689.256 dengan angka kematian mencapai 130.781. Kota Metro yang merupakan 1 dari 2 kota yang ada di Provinsi Lampung juga terkena penularan dari wabah pandemi ini. Kasus Covid-19 yang terjadi di Kota Metro sejak Mei 2020 merupakan masalah yang harus ditangani.

Penerapan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantianaan Kesehatan. Pada awal memasuki tahun 2021 kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan penurunan yang membuat Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas dengan hasil kebijakan konkret yang diambil oleh pemerintah yaitu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID-19) di 7 Provinsi Jawa dan Bali yang membuatnya disebut juga sebagai PPKM Jawa-Bali.

Akibat dari pandemi Covid-19 Indonesia mengalami dampak yang begitu dirasakan oleh masyarakat dalam segala bidang, tidak hanya bidang kesehatan, bidang ekonomi pun mengalami dampak seperti menurunnya pertumbuhan ekonomi, Bahkan di Provinsi Lampung pandemi Covid-19 merupakan faktor utama dalam menurunnya pertumbuhan ekonomi. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM adalah usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perseorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. jumlah UMKM yang ada di Provinsi Lampung tergolong cukup rendah karena hanya mempengaruhi 0,229 % dari total keseluruhan UMKM di Indonesia pada tahun 2019. Kota Metro merupakan salah satu Kota yang ada di Provinsi Lampung dimana memiliki jumlah UMKM terbanyak kedua di Provinsi Lampung yang mencapai 23.854 unit UMKM. UMKM memiliki landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008

Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Masa pandemi seperti sekarang ini semakin menambah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia. Keputusan pemerintah yang kini menggunakan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Level 4 yang diterapkan di Indonesia bertujuan untuk menekan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Namun kebijakan ini juga berpengaruh terhadap menurunnya perekonomian dan bertambahnya jumlah pengangguran.

UMKM sebagai penyerap tenaga kerja yang berpengaruh pada masa kini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Hal itu dikarenakan UMKM adalah penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dibuktikan pada tahun 1997-1999 dan pada tahun 2008-2009 dimana UMKM mampu menyelamatkan Indonesia perlahan dari krisis ekonomi yang sudah pernah terjadi. Dengan banyaknya UMKM di Kota Metro diharapkan dapat membantu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung terkhusus Kota Metro. Karena itulah pemerintah harus memperhatikan dan memanfaatkan UMKM yang ada di Kota Metro. Ketika kualitas UMKM dalam kota tersebut mengalami peningkatan, tentunya juga mampu mendorong perekonomian di Kota Metro.

Berdasarkan uraian dan data yang sudah penulis cantumkan diatas, penulis ingin meneliti bagaimana Pemerintah Kota Metro dapat memberdayakan dan mensejahterakan UMKM ditengah adanya kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PASCA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) LEVEL 4 DI KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG.”**

1.2 **Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disaat pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung. Adanya kebijakan tersebut menimbulkan hambatan yang berpengaruh dalam pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil dan Menengah. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi pembuat kebijakan dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar meningkatkan kualitas kebijakan yang dibuat bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

1.3 Penelitian Terdahulu

Pertama, Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih(2021) ,dengan judul penelitian Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitiannya yakni dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan

Kedua, Qotrunnada Ratri Hamidah dkk(2019) ,dengan judul The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menemukan cara mengembangkan hasil produksi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi agar mampu bersaing di kelas internasional untuk mendukung Indonesia menuju era revolusi industri 4.0.

Ketiga, Wilfarda Charismanur Anggraeni dk , **dengan judul** Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia . Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya yakni pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19.

Keempat, Penelitian Hera Febria Mavilinda dkk(2021) ,dengan judul Menjadi UMKM Unggul Melalui Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital dalam Menghadapi Tantangan Bisnis di Era New Normal. Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun hasil penelitiannya yakni Strategi pemasaran digital dapat berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing pelaku UMKM dalam pemasaran produk. Namun demikian, permasalahan yang terjadi saat ini adalah tidak semua pelaku UMKM di Kota Palembang yang menggunakan pemasaran digital secara optimal, bahkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Sehingga dengan pelatihan strategi pemasaran digital di era new normal bagi para pelaku UMKM di Kota Palembang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan serta mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk menjadi “UMKM Unggul”.

Kelima, Ni Nyoman Pujaningsih dan Dewi Sucitawathi ,dengan judul Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Hasil penelitian menjelaskan bahwa

penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan keadaan yang baharu serta informan yang lebih luas. GAP penelitian juga hanya ada dan merupakan masalah khusus yang terjadi diLokus Penulis.

1.5 Tujuan

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menghambat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung.

II. METODE

Sugiyono (2012:29) mengemukakan bahwa, “setiap peneliti harus dapat menyajikan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara kuesioner (angket) atau dokumen”. Prinsip dasar penyajian data adalah komunikasi dan kelengkapan, dalam artian data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membacanya dan dengan mudah memahami isinya. Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dari skor jawaban masyarakat dan data kualitatif dari jawaban wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Fokus Magang Riset Terapan Pemerintahan

Analisis Fokus Magang Riset Terapan Pemerintahan dari perspektif teoretis yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Metro terkait kesesuaian pelaksanaannya juga faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung, penulis menganalisa data berdasarkan teori implementasi menurut George C. Edward yang kemudian diolah oleh penulis, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur birokrasi. Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4 di Kota Metro Provinsi Lampung sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori Implementasi George C. Edward atau Edward III sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan sebuah syarat dalam menentukan keberhasilan suatu penerapan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dengan bagaimana pelaksana kebijakan dalam mencapai tujuan yang ditransmisikan kepada suatu kelompok sasaran kebijakan. Terdapat indikator dalam menentukan keberhasilan komunikasi yaitu kejelasan informasi dan ketepatan informasi. Ketika komunikasi dilakukan dengan jelas dan tepat maka komunikasi dapat dikatakan berhasil dan berjalan baik, sehingga informasi yang dihasilkan tidak terhalang dan sampai sesuai dengan tujuannya, dengan hasil pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik pula. Ketepatan dan kejelasan Informasi antara pelaku UMKM dan pihak pelaksana kebijakan sudah cukup baik. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah menunjukkan salah satu bentuk pelaksanaan program pemberdayaan dengan dibentuknya grup-grup whatsapp antar pelaku UMKM dengan tujuan agar pelaku UMKM dapat menerima informasi dengan jelas dan tepat yang disampaikan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian.

Pasca kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat, komunikasi yang terjalin antara Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah terjalin dengan sangat baik. Meskipun sebelumnya kesempatan untuk bertemu antar kedua belah pihak sangat sulit, ternyata dengan adanya pemanfaatan media sosial berupa grup whatsapp yang dibentuk sudah cukup membantu dalam penyampaian informasi terkait UMKM yang disampaikan oleh Dinas Koperasi,

UMK, UM, dan Perindustrian. Selain itu respon para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga cukup positif mengenai Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dilihat dari antusias pelaku UMKM dalam menerima informasi yang diberikan oleh dinas terkait.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam penerapan suatu kebijakan. Sumber Daya sendiri memiliki 3 indikator yaitu Kinerja Pelaksana, Ketersediaan anggaran, dan Sarana Prasarana.

a. Kinerja Pelaksana

Dalam kinerja pelaksana pemberdayaan UMKM, Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian dirasa sudah cukup baik dalam melaksanakan program pemberdayaan bagi UMKM. kinerja yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian dalam memberdayakan kembali UMKM yang ada sudah dilakukan dengan sangat baik. Sehingga para pelaku UMKM juga sudah kembali mengembangkan bisnis dan produknya setelah sebelumnya terpuruk akibat adanya kebijakan PPKM.

b. Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan anggaran dari Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah cukup dalam membantu pemberdayaan UMKM di Kota Metro. Bahkan sebelum adanya pandemi mereka sudah membantu pelaku UMKM untuk menjalankan usahanya. Hal itu menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah cukup baik sehingga kegiatan pelaksanaan pemberdayaan UMKM dapat berjalan dengan baik. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya dari pelaku UMKM yang berbeda, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana tersebut masih ada ketidaksesuaian penerima dana, hal ini bisa menghambat pemberdayaan UMKM dikarenakan dana yang seharusnya bisa membantu UMKM namun penyampaiannya tidak tepat sasaran sehingga pelaku UMKM yang seharusnya bisa meningkatkan kualitas UMKM-nya dengan dana tersebut, menjadi gagal karena dana yang ada tidak sampai pada sasaran yang tepat.

c. Sarana Prasarana

Sarana dan Prasarana yang disediakan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro sudah cukup mendukung dalam pemberdayaan UMKM. Dinas

Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah sering memberikan pelatihan bagi para pelaku UMKM sekaligus dengan tempat yang disediakan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian yang bertempat di Nuwo Sesat. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sangat berharap UMKM yang ada di Kota Metro dapat meningkatkan kualitasnya dilihat dari sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas mengenai pelatihan pemasaran dan penjualan produk. Tentunya hal tersebut disambut dengan baik oleh pelaku UMKM yang ada di Kota Metro. pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian disambut baik oleh para pelaku UMKM sehingga program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian berjalan dengan baik.

Berdasarkan indikator-indikator yang ada pada sumber daya, dapat ditunjukkan bahwa program pemberdayaan bagi pelaku UMKM pasca pelaksanaan PPKM terkait sumber daya yang ada sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Meskipun pada ketersediaan anggaran, pengalokasiannya belum sesuai karena masih ada penerima dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diharapkan.

3. Disposisi

Disposisi atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan nyata terhadap suatu implementasi apabila para pelaksana program yang ada tidak melaksanakan kebijakan sesuai yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan diharapkan orang yang benar-benar berdedikasi pada pelaksanaan kebijakan. Karena pelaksanaan kebijakan yang maksimal dapat diperoleh dari dukungan dan kemauan tinggi pelaksana kebijakan. Dalam faktor disposisi, dalam menilai suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari dua indikator yaitu disiplin dan konsisten.

a. Disiplin

Dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan, dibutuhkan para pelaksana program yang disiplin untuk menjalankan program pemberdayaan dengan baik, berdasarkan pengamatan peneliti terkait para pelaksana program pemberdayaan, para pelaksana program sudah melakukan tupoksinya secara maksimal. pelaksana program pemberdayaan dalam hal ini Bidang UMKM Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian Kota Metro sangat disiplin dalam pelaksanaan programnya. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sangat disiplin dalam menjalankan program pemberdayaan bagi pelaku UMKM pasca pelaksanaan PPKM.

b. Konsisten

Selain disiplin, pelaksanaan program pemberdayaan juga harus dilakukan secara konsisten sampai mencapai tingkat keberhasilan yang diharapkan. Sehingga dalam melakukan suatu program pemberdayaan, diperlukan adanya pelaksana kebijakan yang konsisten dalam melaksanakan program tersebut. dalam mencapai keberhasilan suatu kebijakan atau program yang telah dibentuk, perlu adanya kerja sama yang baik antara pelaksana kebijakan dalam hal ini Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian dan juga para pelaku UMKM sehingga program tersebut dapat terus dilakukan agar nantinya mencapai hasil yang diharapkan. Dilihat dari dua indikator, yaitu disiplin dan konsisten yang berjalan dengan cukup baik sehingga jika dilihat dari sudut pandang disposisi, pelaksanaan program pemberdayaan UMKM pasca kebijakan PPKM dikatakan sudah terlaksana dengan baik.

4. Struktur Birokrasi

Terdapat dua aspek penting yang tercakup dalam Struktur Birokrasi, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Pembagian Tugas yang menjadi pedoman dalam penerapan suatu kebijakan, agar dalam pelaksanaannya tidak melenceng dari sasaran kebijakan.

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Dalam penerapan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan program Pemberdayaan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian sudah menjalankan Standar Operasional Prosedur yang ada menyesuaikan dengan SOP penanganan pandemi covid-19. Meskipun tidak ada pengurangan pegawai, namun dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Ketika melaksanakan program pemberdayaan, tidak hanya Dinas Koperasi, UMK, UM, dan Perindustrian yang melaksanakan SOP yang ada, namun juga para pelaku UMKM dituntut untuk melaksanakan SOP tersebut agar tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan program pemberdayaan. pelaku UMKM juga mengikuti standar operasional prosedur untuk tetap menjaga protokol kesehatan saat mengikuti program pemberdayaan. Sehingga dalam pelaksanaan programnya dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada diikuti dari kedua belah pihak.

b. Pembagian Tugas

faktor keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan dalam hal struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan dua indikator yang sudah berjalan dengan maksimal dalam pelaksanaan program pemberdayaan terkait struktur birokrasi. Berdasarkan beberapa pembahasan yang telah disebutkan, pelaksanaan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah pasca berlangsungnya kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Metro Provinsi Lampung sudah berjalan cukup baik. Dibuktikan dengan teori yang telah disampaikan oleh George G. Edward, yang menyebutkan terdapat empat faktor dalam pelaksanaan kebijakan. Keempat faktor yang telah disebutkan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan dalam pengamatan penulis. Meskipun pada ketersediaan anggaran, pengalokasiannya masih belum sesuai sehingga perlu adanya evaluasi dari dinas terkait.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Vina Natasya dan Pancawati Hardiningsih(2021) ,dengan judul penelitian Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. Adapun temuan penelitiannya yakni dapat memberikan informasi tambahan pemerintah dalam menyiapkan skema besar untuk program perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi UMKM yang terdampak Covid-19 serta mengevaluasi strategi bisnis UMKM menuju model bisnis UMKM yang modern dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Qotrunnada Ratri Hamidah dkk(2019) ,dengan judul The Development of Small and Medium Businesses (MSMEs) Based on Tecnology to Deal with The Industrial Revolution 4.0. Menggunakan metode kualitatif deskriptif . Adapun temuan penelitiannya menunjukkan bahwa menemukan cara mengembangkan hasil produksi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis teknologi agar mampu bersaing di kelas internasional untuk mendukung Indonesia menuju era revolusi industri 4.0.

Wilfarda Charismanur Anggraeni dk , dengan judul Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan UMKM di Masa Pandemi Covid- 19 di Indonesia . Adapun temuan penelitiannya yakni pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka memperdayakan UMKM dalam situasi pandemi Covid-19. Hera Febria Mavilinda dkk(2021) ,dengan judul Menjadi UMKM Unggul Melalui Optimalisasi Strategi Pemasaran Digital dalam Menghadapi Tantangan Bisnis di Era New Normal. Adapun temuan penelitiannya yakni Strategi pemasaran digital dapat berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing pelaku UMKM dalam pemasaran produk.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi saat ini adalah tidak semua pelaku UMKM di Kota Palembang yang menggunakan pemasaran digital secara optimal, bahkan masih banyak pelaku UMKM yang belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Sehingga dengan pelatihan strategi pemasaran digital di era new normal bagi para pelaku UMKM di Kota Palembang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan serta mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk menjadi “UMKM Unggul”. Ni Nyoman Pujaningsih dan Dewi Sucitawathi, dengan judul Penerapan Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) Dalam Penanggulangan Wabah Covid-19 Di Kota Denpasar. Temuan penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan kebijakan PKM di Kota Denpasar meliputi beberapa hal yaitu pembatasan kerumunan masyarakat, larangan bepergian tanpa menggunakan masker, pergerakan masyarakat tanpa tujuan jelas, larangan kendaraan roda empat yang penuh penumpang, pembatasan aktivitas kendaraan barang dan pembatasan jam operasional kegiatan usaha (toko).

Pembaharuan temuan penelitian sebelumnya dari penelitian terdahulu yakni pasca pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 4 menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Anggaran yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berupa Bantuan Stimulus tidak tepat sasaran, terdapat kekeliruan pemberian bantuan stimulus kepada pelaku usaha yang tidak mempunyai usaha sama sekali. Dinas Koperasi dan UMKM sebagai organisasi perangkat daerah yang menaungi jalannya usaha mikro, kecil dan menengah terus berupaya dalam meningkatkan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah setelah terdampak kebijakan tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Uraian Pembahasan dari hasil penelirian di sub-bab sebelumnya, merujuk pada teori yang peneliti gunakan maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

a. **Komunikasi**

Proses komunikasi yang terjadi dalam Penerapan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah sangat baik. Pelaksana program mampu menyampaikan informasi dengan tepat dan jelas kepada para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah meskipun masih dalam akses media sosial.

b. **Sumber Daya Penerapan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah** jika ditinjau dari segi sumber daya, sudah dikatakan cukup baik. Hanya saja pada

pelaksanaanya, anggaran yang digunakan untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam meningkatkan kualitas usahanya masih sering salah sasaran. Hal ini menyebabkan pihak UMKM yang benar-benar membutuhkan dana tersebut sangat menyayangkan kejadian tersebut.

c. Disposisi

Dari segi disposisi, pelaksana kebijakan sudah sesuai yang diharapkan. Ditinjau dari dua indikator yang terdiri dari disiplin dan konsisten, pelaksana kebijakan sudah memenuhi dua standar tersebut berdasarkan pembahasan yang telah disebutkan pada bab sebelumnya.

- d. Struktur Birokrasi Penerapan pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah sesuai dengan struktur birokrasi yang ada. Dalam melaksanakan Standar Operasional Prosedur, pelaksana program pemberdayaan umkm sudah sesuai dengan SOP yang ada. Pembagian tugas juga sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu kelurahan saja sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat George C. Edward saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan Dengan Pelaksanaan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Pasca Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Level 4 Di Kota Metro Provinsi Lampung untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih serta penghargaan sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Metro Provinsi Lampung serta jajaran, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ambar, T. S. (2004). *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Jaya, M., & Laut, I. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edwards III, George C. 2003. *Implementing Public Policy*. Jakarta
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

